

## Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Terapan Kemahiran

Getting the books **mata kuliah hukum acara pidana terapan kemahiran** now is not type of inspiring means. You could not and no-one else going considering book accretion or library or borrowing from your associates to open them. This is an entirely easy means to specifically get lead by on-line. This online message mata kuliah hukum acara pidana terapan kemahiran can be one of the options to accompany you afterward having supplementary time.

It will not waste your time. acknowledge me, the e-book will no question way of being you supplementary business to read. Just invest little epoch to entrance this on-line declaration **mata kuliah hukum acara pidana terapan kemahiran** as competently as evaluation them wherever you are now.

*Hukum Acara Pidana - M. Fatahillah Akbar S.H L.LM Hukum Acara Pidana: Pengertian Hukum Acara Pidana, Tujuan serta Ruang Lingkupnya Hukum Acara Pidana*

---

ASAS-ASAS DAN PRINSIP HUKUM ACARA PIDANA BAGIAN 1 (PERTAMA) ~~Simulasi Sidang Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Hukum Acara Pidana 1 Semester dalam 15 Menit~~ **asas asas dalam hukum acara pidana** ~~Kuliah Umum Hukum Acara Pidana Hukum Acara Perdata Bersama Pengadilan Negeri Tangerang Kuliah Online - Hukum Acara Pidana (FH Unsika) HUKUM ACARA PIDANA PERTEMUAN 1~~ **Hukum acara pidana dari sudut pandang Praktisi** ~~u0026 Akademis~~ **ASAS-ASAS DAN PRINSIP HUKUM ACARA PIDANA BAGIAN II (KEDUA)** ~~Prof Dr Eddy Hiariej - Hakim Keliru Dalam Mengambil Putusan Hukum Irman Gusman Ini Rahasia Yusril Sering Menang Kasus di Pengadilan Bidang Penerapan Sanksi Pidana - Prof. Dr. Eddy, S.H., M.Hum. | Anotasi Hukum UU Cipta Kerja Pra Penuntutan II~~ **Hukum Acara Pidana (C15) II Kuliah Selama Pandemi**

---

PRAKTEK SIDANG SEMU PIDANA - SIDANG 1 ~~Profil Dr. Otto Hasibuan, SH, MM. Kuliah Online - Hukum Pidana Asas-Asas Hukum Pidana #TIPSHUKUM Hadapi Perkara Pidana #GetToKnow - TIPS~~ ~~u0026 TRICK MASUK ILMU HUKUM SEJARAH HUKUM PIDANA DI INDONESIA HUKUM ACARA PIDANA PRA AJUDIKASI DAN AJUDIKASI Strategi dan Teknik Beracara Pidana Materi Pertemuan Ke 3~~ ~~kuliah Hukum Acara Pidana Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia Hukum Acara Pidana 101 - yuk belajar daripada nontonin~~ **Konspirasi**

---

Memahami Peran Jaksa dan Tahapan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana ~~Prof. Eddy O.S. Hiariej - Apa Itu Hukum Pidana ?~~ **Mata Kuliah Hukum Acara Pidana**

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan pancasila dan UUD 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan yang namanya sebuah hukum yang hidup atau yang

### (DOC) MAKALAH MATA KULIAH HUKUM ACARA PIDANA | SUREPNO ...

Hal yang perlu diketahui perbedaan antara hukum pidana (materil) dan hukum acara pidana (formil) yaitu kalau hukum pidana (materil) adalah keseluruhan peraturan hukum yg menunjukkan perbuatan mana yg dikenakan pidana, sedangkan hukum acara pidana (formil) adalah bagaimana Negara melalui alat kekuasaanya untuk menjatuhkan pidana.

### Materi Kuliah Hukum Acara Pidana | Pusat Hukum

Apabila kita simak definisi hukum acara pidana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa tujuan

## Acces PDF Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Terapan Kemahiran

atau fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk menegakkan atau mengkongkritkan hukum pidana materil. II. Asas-Asas dan Sejarah Hukum Acara Pidana A. Asas-Asas Hukum Acara Pidana 1.

### **DISKUSI MATA KULIAH PERKUMPULAN GEMAR BELAJAR (GEMBEL ...**

MATA KULIAH HUKUM ACARA PIDANA TERAPAN/KEMAHIRAN • Adalah pembelajaran hukum acara pidana terapan, tidak lagi mempe-lajari hukum acara pidana normatif. • Buku Wajib: KEMAHIRAN PRAKTIK HUKUM PIDANA Oleh Drs. Adami Chazawi, S.H • Mahasiswa disamping wajib membaca buku, harus banyak berlatih mandiri atau kelompok 1

### **MATA KULIAH HUKUM ACARA PIDANA TERAPAN/KEMAHIRAN**

#### **BAHAN KULIAH HUKUM ACARA PIDANA-PEMBUKTIAN DAN UPAYA HUKUM**

#### **(PPT) BAHAN KULIAH HUKUM ACARA PIDANA-PEMBUKTIAN DAN UPAYA ...**

1. Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Prof. Moeljatno, S.H., Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan ...

### **MATERI KULIAH HUKUM PIDANA – SHELAW**

SATUAN ACARA PERKULIAHAN I. Identitas Mata Kuliah Nama Mata Kuliah : Perbandingan Hukum Pidana Kode : Jurusan/Prodi : Jumlah sks : 2 SKS Jumlah jam Kuliah dalam seminggu : 2 jpl (2 x 50 menit) Penyusun : Pangestika Rizki Utami, M.H. Penanggungjawab Keilmuan : Tgl. Mulai berlaku : II.

### **SATUAN ACARA PERKULIAHAN I. II. III.**

HUKUM PIDANA ANAK (HKM6209), 2 SKS, SMT II Silabus Dalam mata kuliah ini akan dibahas perkembangan tentang hukum pidana anak, pertanggungjawaban pidana untuk anak, pembedaan terhadap anak ditinjau dari segi yuridis dan pendekatan aspek-aspek non yuridis. Pembahasannya mencakup bagaimana bila anak yang menjadi korban kejahatan.

### **HUKUM PIDANA ANAK (HKM6209), 2 SKS, SMT II Silabus Satuan ...**

Hukum Acara Pidana Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan sekaligus melatih mahasiswa memahami bagaimana proses peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan KUHAP maupun undang-undang terkait.

### **ILMU HUKUM: MATA KULIAH ILMU HUKUM**

materi ujian tengah semester fakultas hukum mata kuliah hukum acara perdata ujian tengah semester (uts) fakultas hukum universitas mpu tantular tahun fakultas hukum mata kuliah hukum acara perdata" itemprop="url"></a>

### **MATERI UJIAN TENGAH SEMESTER FAKULTAS HUKUM MATA KULIAH ...**

Jika memiliki minat pada hukum, dan merasa perlu memahami berbagai regulasi maka jurusan ini cocok untukmu Terdiri dari banyak bidang peminatan mulai dari Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi, Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Hukum Internasional, hingga Hukum Kemasyarakatan.

### **Jurusan Ilmu Hukum - Mata Kuliah, Prospek Kerja, Universitas**

Materi Kuliah Hukum Menu. Uncategorized; ... Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis Read More. Uncategorized. HUKUM MEMPELAJARI ILMU SIHIR GUNA MEMBENTENGI DIRI. ... Hukum Acara PTUN NEGARA HUKUM DAN PERADILAN ADMINISTRASI. admin | November 23, 2020.

### **Materi Kuliah Hukum – Kumpulan Materi Kuliah Hukum**

Soal UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana dan kunci jawaban kami bagikan untuk Anda Mahasiswa UT yang tak lama lagi akan mengikuti Ujian Akhir Semester. Pada artikel yang lalu, kami telah berbagi juga Soal UT Ilmu Hukum Semester 6 yaitu Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata yang bisa Anda pelajari juga, karena mata kuliah tersebut juga akan Anda ujikan nantinya.

### **Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana dan ...**

Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bu Maya Shafira S.H.,M.H. pada Mata Kuliah Hukum Acara dan Pratek Peradilan Pidana. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang Terkait Hukum Acara Pidana Khususnya dibidang Penangkapan dan Penahanan bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

### **Makalah Penangkapan dan Penahanan.docx - RESUME PENANGKAPAN ...**

UU ini terdiri dari UU pidana materiil dan formal (UU acara pidana). Kedua UU hukum pidana ini dikenal dengan sebutan “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (seperti KUHP, UU No. 8/1981 tentang KUHAP, KUHP Militer). Hukum Pidana Khusus ada yang berhubungan dengan Hukum Administrasi (HPE, Hk.

### **HUKUM PIDANA KHUSUS – Sulis Setyowati, S.H., LL.M**

MATA KULIAH KODE MK SKS Semester Konsentrasi HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN ANAK 18B01211902 2 II Hukum Pidana OTORISASI ... hukum acara pidana terhadap anak, pengaturan tentang diversi dan pemidanaan terhadap anak. Buku Acuan: 1 2 Arif Gosita, 1984, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta. Kartini Kartono, 1992. Pathologi ...

### **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER - Fakultas Hukum Unhas**

Secara umum, semua mata kuliah di hukum kamu harus mengerti. tapi itu balik lagi ke peminatan kamu di hukum apa. Misalnya, kamu mau fokus di hukum perdata maka kamu harus mengerti dasar dasar hukum perdata, hukum acara perdata, hukum perikatan, dll. begitu juga dengan peminatan hukum lainnya

## **Mau Kuliah di Jurusan Hukum? Yuk Baca ini dulu ...**

Departemen Hukum Acara merupakan salah satu dari delapan (8) departemen yang ada di Fakultas Hukum. Departemen Hukum Acara dipimpin oleh .  
Ketua : Prof. Dr. Andi Suryaman Mustari Pide, S.H., M.H. Sekertaris : Dr. Andi Syahwiah, S.H., M.H. Departemen Hukum Acara terdiri dari beberapa dosen Fakultas Hukum yang mengasuh mata kuliah dan memiliki expertise dibidang Hukum Acara.

## **Hukum Acara - Fakultas Hukum Unhas**

Bingkaiberita.com – Prospek Kerja memang dibutuhkan sebagai salah satu alasan untuk memilih suatu jurusan, salah satunya adalah Jurusan Hukum Keluarga Islam yang notabene jurusan dengan konsentrasi hukum keluarga ini memang tidak banyak diminati oleh sebagian orang. Seseorang lebih memilih ke jurusan Hukum konvensional tanpa sebuah embel-embel seperti hukum keluarga Islam.

Buku ini menarik juga untuk dicermati. Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membahas beberapa persoalan dalam bidang hukum acara pidana, tidak melulu menggunakan pendekatan yang lazimnya sudah dikenal dalam kajian bidang hukum. Penulis juga malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah lebih dulu dikenal dalam bidang linguistik dan komunikasi untuk dibawa masuk ke dalam ranah kajian bidang hukum. Sehingga dengan membaca dan mencermati buku ini, para pembaca akan ditambah pula wawasannya, selain mengenai isu-isu di bidang hukum acara pidana, juga mengenai metodologi penelitian. (Duta Besar Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila) Buku yang ada di tangan pembaca saat ini memiliki pendekatan yang berbeda untuk membongkar aspek ideologis (kepentingan) dari para penegak hukum, yang tidak umum dilakukan oleh peneliti hukum, yaitu masuk dari sisi kajian semiotika dan komunikasi atau secara umum. Perbedaan antara isi buku ini dengan yang lain adalah mengkaji Hukum Acara Pidana melalui kajian 'bahasa'. Kelebihannya, para Penulis buku ini tidak melepaskan kekhasan dalam suatu kajian hukum yaitu tetap berpijak kepada pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. (Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila) Ulasan mengenai penegakan hukum sebagaimana di bahas dalam buku ini, yang berada ditangan pembaca saat ini menarik untuk disimak lebih mendalam. Substansi tulisannya menguraikan hukum bukan saja dari aspek normatif, namun juga dari aspek sosial, serta kajiannya menggunakan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin, sehingga keberadaan Ilmu Hukum sebagai Ilmu Praktis yang bertujuan untuk menawarkan penyelesaian terhadap masalah (isu) hukum yang konkrit, khususnya yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, tergambar (diuraikan) dengan jelas dalam buku ini. (Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., MS Guru Besar Ilmu Hukum/Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara)

Dalam praktik peradilan pidana sering kali pihak yang berkepentingan tidak menerima putusan yang dijatuhkan hakim di sidang pengadilan karena dipandang tidak atau kurang adil. Akibatnya, pihak yang berkepentingan berupaya untuk melawan putusan pengadilan tersebut atau yang disebut dengan upaya hukum. Di dalam hukum acara pidana terdapat beberapa jenis upaya hukum yang dapat digunakan untuk melawan putusan pengadilan (termasuk penetapan pengadilan). Buku dengan judul Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di dalam Hukum Positif dan Perkembangannya karangan Ramiyanto, S.H.I., M.H., ini mencoba untuk membahas upaya-upaya hukum perkara pidana secara gamblang dan komprehensif. Harapannya agar para pembaca dapat memahami upaya-upaya hukum yang disediakan hukum acara pidana. Keunggulan dari buku ini adalah pembahasannya tidak hanya merujuk pada

ketentuan di dalam KUHAP, tetapi juga merujuk pada undang-undang khusus. Selain itu, pembahasan dalam buku ini pun merujuk pada praktik peradilan (yurisprudensi) dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Buku ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi para akademisi dan praktisi hukum, mahasiswa hukum strata satu (S-1) yang sedang mnengambil mata kuliah Hukum Acara Pidana, serta masyarakat luas yang berminat mempelajari upaya hukum perkara pidana, atau masyarakat yang hendak menggunakan upaya hukum perkara pidana. Akhir kata, selamat membaca dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat. Buku persembahan penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI

Pengertian Hukum Acara Pidana menurut penulis adalah serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran materiel perkara pidana dengan proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak individu) menurut sistem yang telah ditentukan. Konsiderans huruf c KUHAP menegaskan, bahwa pembangunan hukum nasional di bidang Hukum Acara Pidana supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadi motivasi bagi penulis untuk memberi manfaat dalam proses pembangunan di bidang hukum acara pidana. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Viktimologi sebagai disiplin ilmu adalah hasil perpaduan multidisplin keilmuan, mulai dari hukum, kriminologi, sosiologi maupun psikologi. Karena itulah viktimologi terus tumbuh berkembang secara substantif dan semakin banyak mendapatkan perhatian. Viktimologi telah memberikan sumbangan dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang korban kejahatan akibat tindakan manusia yang menimbulkan vi | Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana penderitaan fisik, mental dan sosial. Memang inilah yang menjadi salah satu tujuan dari viktimologi, yaitu untuk memberikan penjelasan mengenai kedudukan korban dan hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Viktimologi juga telah memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, bahkan pendapat-pendapat viktimologis dipergunakan dalam putusan-putusan peradilan pidana dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal, serta mempengaruhi studi-studi mengenai hak asasi manusia. Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Kemahiran Beracara Pidana yang juga dikenal sebagai Praktik Peradilan Pidana merupakan pedoman bagi para praktisi dan/atau penegak hukum maupun para akademisi dalam menjalankan profesinya yang secara substansial muatannya berbeda dengan Hukum Acara Pidana. Materi Kemahiran Beracara Pidana yang dimuat dalam buku ini dominan berkaitan dengan sistem peradilan pidana, mulai dari pemberkasan perkara dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga persidangan di Pengadilan hingga pelaksanaan putusan pidana disertai dengan tugas dan kewenangan masing-masing pihak yang terlibat dalam proses atau sitem peradilan pidana dimaksud, khususnya para aparat penegak hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, kejaksaan, pengadilan dan advokat. Buku Kemahiran Beracara Pidana ini merupakan buku kemahiran yang mampu menghantarkan mahasiswa untuk menjadi terampil dan mahir dalam beracara pidana, karena muatannya berkaitan dengan praktik peradilan pidana sehingga sekaligus dapat menjadi pedoman bagi para advokat, termasuk Jaksa Penuntut Umum maupun hakim dalam melakukan tugas masing-masing di bidang penegakan hukum. Pada bagian lampiran, buku ini dilengkapi dengan dokumen penting terkait dengan praktik peradilan pidana, seperti surat kuasa, surat dakwaan, eksepsi atau tangkisan, surat tuntutan, pledoi serta berbagai kaidah putusan MARI sebagai jurisprudensi.

Buku ini merupakan buku yang menggabungkan dua buku pelajaran Hukum Acara Pidana yang sama yang diterbitkan kurang lebih 19 tahun yang lalu. Kedua buku yang sudah diterbitkan lebih dahulu tersebut berjudul Sari Hukum Acara Pidana IA dan Sari Hukum Acara Pidana IB. Baik buku yang pertama (IA) maupun buku yang kedua (IB) merupakan suatu kesatuan yang membahas tentang materi hukum acara pidana baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan dan sebagainya. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa serta peminat masalah hukum lainnya. Oleh sebab itu guna memenuhi kebutuhan tersebut buku ini disusun dalam bahasa yang sedemikian mudah dimengerti dan maksud dan isinya. Sekalipun demikian, tanpa meninggalkan hakikat keilmuan dalam bidang hukum, buku ini disusun dalam perspektif suatu teori Hukum Bangsa Indonesia, yaitu teori Keadilan Bermartabat (the Dignified Justice Theory/Jurisprudence/Philosophy of Law). Karena perspektif keilmuan dalam bidang hukum itulah, maka buku ini mendapatkan predikat sifat bermartabat. Unik bila dibandingkan dengan buku-buku sejenis lainnya, karena itu, judul yang diberikan tidak semata-mata Hukum Acara Pidana tetapi Hukum Acara Pidana Bermartabat. Buku yang ada di tangan pembaca ini, saya susun dalam rangka menjawab tantangan yang berasal dari tokoh-tokoh dan ilmuwan terkemuka yang menggeluti Filsafat dan Teori Hukum yang masih saja selalu bertanya-tanya, kapankah dalam pengembangan hukum di Indonesia dapat ditemukan suatu Ilmu Hukum Nasional Indonesia yang modern, yang dapat dipakai sebagai suatu Filsafat Hukum, Teori Hukum atau Jurisprudence yang universal karena berakar atau berjiwa Pancasila, termasuk dalam menggambarkan dan menerangkan tentang Hukum Acara Pidana. Jurisprudence atau Teori Keadilan Bermartabat yang selalu ada dalam berbagai karya yang sudah saya hasilkan, dan yang digambarkan dalam buku ini tidak hanya menjawab tantangan sebagaimana dikemukakan di atas, tetapi juga berusaha untuk melepas ketergantungan Sistem Hukum di Indonesia terhadap pemikiran-pemikiran (filsafat, teori, doktrin atau ajaran dan dokmatika) yang ditemukandan dikembangkan di Barat. Dengan demikian, maka ada martabat dari Sistem Hukum Pancasila, karena sistem dan pemikiran hukum yang dinamakan dengan Keadilan Bermartabat itu dibangun dengan bahan-bahan yang ada atau digali dari dalam “bumi”, dari dalam pikiran dan jiwa bangsa (Volksgeist) bangsa Indonesia. Sekalipun demikian, karena hukum, termasuk Hukum Acara Pidana itu adalah suatu institusi yang universal, maka dalam teori Keadilan Bermartabat, sejauh pemikiran-pemikiran hukum yang ditemukandan berkembang dalam Tata Hukum sistem dan negara beradab lainnya tetap dilihat dengan cermat, manakala ada yang dapat dipergunakan bagi kritik dan pengembangan Sistem Hukum, setelah disaring terlebih dahulu dengan Sistem Hukum Pancasila yang bermartabat.

Hukum Pidana merupakan mata kuliah dasar yang wajib di ikuti oleh mahasiswa tingkat awal (semester 2) pada setiap fakultas hukum. Hukum Pidana merupakan mata kuliah dasar karena hukum pidana berfungsi memberikan pemahaman yang mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan definisi hukum pidana, hakekat hukum pidana materiil baik asas-asas hukum pidana, teori maupun ketentuan -ketentuan hukum pidana dalam KUHP termasuk juga penegakan hukumnya yang digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum pidana yang timbul di masyarakat. Buku ini disusun dengan penyesuaian berdasarkan RPKPS (Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester) yang berlaku di Fakultas Hukum. Terlepas dari semua itu, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya.

### Pengantar Hukum Indonesia LENGKAP

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia cukup pesat dengan diundangkannya beberapa undang-undang baru yang mengatur hukum acara yang secara khusus disesuaikan dengan semakin berkembangnya tindak pidana di era modern ini. Beberapa perubahan signifikan telah diletakkan dalam sistem hukum acara yang secara tidak langsung juga berpengaruh pada bekerjanya lembaga penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Buku Sistem Peradilan

Pidana di Indonesia: Teori dan Praktik ini ditulis untuk menjembatani praktik hukum yang sudah semakin pesat berkembang dengan teori-teori lama yang masih dipertahankan di beberapa fakultas hukum yang sudah dirasa tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Buku ini diharapkan akan mengisi gap yang kosong di antara praktik dan teori sistem peradilan pidana berdasarkan penelitian dan artikel yang ditulis oleh para dosen hukum pidana yang berpengalaman di bidangnya. Buku ini rencananya juga akan dijadikan bahan ajar mata kuliah sistem peradilan pidana di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penyusunan surat dakwaan sudah sangat panjang lebar tidak “to the point,” sulit dimengerti, bertentangan dengan kecenderungan global, yang mestinya dakwaan itu cermat, jelas dan lengkap. Di samping itu, walaupun ada kata-kata “lengkap” dalam KUHAP (Pasal 143), tidak berarti panjang lebar dan tidak jelas. Lengkap maksudnya semua bagian inti delik (*delictsbestanddelen*) yang orang sebut unsur delik harus termuat di dalamnya. Seharusnya, padat, singkat dan mudah dimengerti oleh terdakwa dan hakim sebagaimana diatur dalam ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), “European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms”, KUHAP dan dulu Pasal 15 UUPTPK No. 3 Tahun 1971. Surat dakwaan langsung menyentuh hak asasi manusia, karena dengan surat dakwaan itulah seseorang terdakwa akan dijatuhi pidana.

Copyright code : bbad617b5ffb5d4cdfa63661f64b35d1